

Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Meningkatkan Budaya Mutu Di SD IT Tafizil Qur'an Yayasan Islamic Center Sumatera Utara (YIC-SU)

Ahmad Raihan Azizi

Universitas Islam Negeri Sumumatra Utara

Email: ahmad.raihan.1305@gmail.com

Leni Hermita Hasibuan

Universitas Islam Negeri Sumumatra Utara

Email: lenihermitahsb@gmail.com

Lusi Mqfiroh

Universitas Islam Negeri Sumumatra Utara

Email: lusimaqfiroh@gmail.com

Korespondensi penulis: ahmad.raihan.1305@gmail.com

Abstract: Education policy analysis in improving quality culture through a process of predetermined stages to formulate problems that nanitnya bring up alternative policies as problem solving and improve the quality of education. The purpose of this study was to analyse the application of educational policy analysis in improving quality culture at SD - IT Tafizil Qur'an Yayasan Islamic Center North Sumatra (YIC-SU). This research method uses qualitative research using primary and secondary data collection techniques. Data sources include interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that SD - IT Tafizil Qur'an (YIC-SU) in conducting educational policy analysis to improve quality culture by conducting several stages, namely 1). Problem formulation, 2). Policy agenda and formulation of policy alternatives, 3). Policy determination. The results obtained by SD - IT Tafizil Qur'an (YIC-SU) can build a good and sustainable quality culture so that it continues to be a school that is in great demand.

Keywords: Education Policy Analysis, Quality Culture, Policy Alternative

Abstrak: Analisis kebijakan pendidikan dalam meningkatkan budaya mutu melalui proses tahapan yang telah ditentukan untuk merumuskan masalah yang nanitnya memunculkan alternatif kebijakan sebagai penyelesaian masalah maupun meningkatkan mutu pendidikan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa penerapan analisa kebijakan pendidikan dalam meningkatkan budaya mutu di SD - IT Tafizil Qur'an Yayasan Islamic Center Sumatera Utara (YIC-SU). Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Sumber data diantaranya berasal dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa SD - IT Tafizil Qur'an (YIC-SU) dalam melakukan analisis kebijakan pendidikan untuk meningkatkan budaya mutu dengan melakukan beberapa tahapan, yaitu 1). Perumusan masalah, 2). Agenda kebijakan dan perumusan alternatif kebijakan, 3). Penetapan Kebijakan. Hasil yang didapat SD - IT Tafizil Qur'an (YIC-SU) dapat membangun budaya mutu yang baik dan berkelanjutan sehingga terus menjadi sekolah yang banyak diminati.

Kata Kunci: Analisis Kebijakan Pendidikan, Budaya Mutu, Alternatif Kebijakan

PENDAHULUAN

Penyepaduan program tahfizul Qur'an dengan kurikulum pendidikan formal pada SD – IT Tahfizil Qur'an YIC – SU merupakan sebuah program pendidikan yang di unggulkan dan menjadi program pendidikan yang diminati dimasyarakat. Program pendidikan seperti ini sangat populer dilingkungan orang tua yang menginginkan pendidikan bagi anak-anaknya selain pendidikan formal, namun juga pendidikan islami yang intensif yang membangun karakter. Selain itu bentuk kebijakan pendidikan yang terus berkembang menuju pewujudan pendidikan

karakter berbanding lurus dengan bentuk visi misi sekolah ini untuk terus mewujudkan pendidikan yang berbasis karakter berdasarkan Al-qur'an dan Assunnah.(Sartika et al., 2020). Untuk dapat terus menjadi pendidikan yang diminati maka tidak terlepas dari mutu yang terus terjaga dan budaya mutu yang baik yang terus berjalan didalam organisasi pendidikan tersebut. (Ritaudin, 2021)

Budaya mutu merupakan suatu penilaian yang kesinambungan pada sebuah organisasi, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perbaikan mutu yang berkesinambungan. Carvin yang dikutip oleh nasution mengatakan bahwa mutu adalah suatu kondisi dinamis yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen yang meliputi proses dan tugas, manusia dan tenaga kerja, produk serta lingkungan.(Kemerdekaan et al., 2017) Didalamnya terdapat prosedur, nilai – nilai, tradisi dan harapan tentang promosi mutu. Budaya mutu merupakan sistem nilai yang menciptakan lingkungan yang kondusif yang dibangun untuk perbaikan yang berkelanjutan dalam segi mutu, penting sekali bagi setiap lembaga pendidikan seperti sekolah dan madrasah untuk memperhatikan ini dalam membangun Mutu yang diharapkan. (Chairunisa & Zulkarnain, 2018)

Nursya'bani Purnama mengungkapkan hal yang sama terkait dengan pengertian budaya mutu yaitu sistem dalam organisasi untuk membentuk lingkungan yang kondusif yang bertujuan menciptakan perbaikan mutu yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Sejalan dengan itu John west burhan memaparkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi budaya mutu pada sebuah sekolah atau madrasah, yaitu diantaranya : 1) stuktur Organisasi, 2) perencanaan dan kurikulum, 3) manajemen sumber daya dan anggaran, 4) nilai-nilai madrasah, 5) disiplin, 6) komunikasi, 7). pengambilan keputusan, 8). lingkungan kerja, 9) rekrutmen dan seleksi, 10) hubungan masyarakat. Selain itu budaya mutu dari sekolah juga dapat dilihat dari tertib administrasinya yaitu ada tidaknya efektifitas dan efisisensi dari mekanisme kerja yang berjalan baik secara vertikal maupun secara horizontal.(Maharani, 2017)

Dalam dimensi kebijakan pendidikan secara linear memiliki hubungan untuk dengan analisis kebijakan pendidikan yang dilakukan menjadi pendekatan dan teknik untuk meningkatkan budaya mutu di sekolah maupun madrasah. Interpretasi kebijakan digunakan untuk melakukan pendekatan-pendekatan dalam organisasi sebuah sekolah dan madrasah untuk digunakan mencapai tujuan pendidikan dan juga dalam peningkatan mutu pendidikan.(Mubin Noho et al., 2022)

Analisis ini telebih khusus dalam peningkatan budaya mutu dilakukan dengan berangkat dari regulasi pemerintah yang telah mencanangkan standarisasi bagi pendidikan Indonesia yang telah ada sejak era reformasi. Ini dapat dilihat dengan regulasi pemerintah

dalam merancang pengukuran mutu yang berkelanjutan, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dll. Diantaranya dapat disebutkan: (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (2) UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (3) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (4) PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan perubahannya pada No. 32 Tahun 2013, (5) PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, (6) PP No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen, (7) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, (8) PP No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka dari beberapa regulasi tersebut dapat dilihat dan disimpulkan pemerintah sudah melakukan sistematika penstandaran mutu baik dalam cakupan internal sekolah maupun luar sekolah (Muliati, 2016).

Selain menjadi perumusan dalam visi dan misi yang terarah, analisis kebijakan pendidikan dilakukan untuk merumuskan pendekatan - pendekatan atas penanganan sebuah masalah dari sekolah atau madrasah. Carter v Good yang dikutip dari Jumari dkk, ia mengungkapkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan sebuah sistem nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor – faktor yang bersifat situasional yang mengarahkan kepada pertimbangan. Yang nantinya pertimbangan ini digunakan sebagai perencanaan umum dan mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga serta menjadi pedoman dalam mengambil keputusan agar mencapai tujuan dari sifat yang melembaga tersebut. (Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan & Abzul, 2022)

Kebijakan pendidikan merupakan salah satu kebijakan publik selain daripada kebijakan ekonomi, politik, dan sosial. Maka dalam analisis kebijakan pendidikan perlu diadakannya perumusan (formulasi) kebijakan untuk melakukan pendekatan – pendekatan penyelesaian masalah atau disebut juga sebagai pengembangan dan sintesis alternatif – alternatif pemecahan masalah. Hal ini merupakan bagian dari serangkaian proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Perumusan atau formulasi kebijakan ini dilakukan oleh para aktor pembuat kebijakan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah yang ada. Proses perumusan ini dikatakan sebagai perumusan yang efektif apabila memperhatikan antara keselarasan usulan kebijakan dengan agenda dan strategi besar (grand design) pemerintah, dan dari sekian banyak alternatif penyelesaian yang ada maka dipilih alternatif kebijakan yang terbaik. (Farkhan et al., 2022)

Dalam merumuskan kebijakan tersebut, Islami yang dikutip oleh Jumari dkk, mengungkapkan bahwa ada empat langkah yang dilakukan dalam proses pengambilan kebijakan publik.

1. Perumusan Masalah (*defining problem*)

Perumusan masalah dilakukan oleh mereka yang terkena masalah atau orang lain yang mempunyai tanggung jawab dan pembuat kebijakan yang mempunyai kapasitas atasnya. Perumusan masalah merupakan sumber dari kebijakan publik. Pemahaman terhadap masalah membantu memadukan pandangan yang bertentangan dengan rancangan peluang kebijakan baru, memetakan tujuan – tujuan yang memungkinkan, membantu menemukan asumsi – asumsi yang tersembunyi dan mendiagnosis penyebab – penyebabnya.

2. Agenda Kebijakan.

Agenda kebijakan timbul karena adanya pilihan dan kecondongan perhatian pemuat kebijakan. Sebelum masalah berkompetisi masuk dalam agenda kebijakan, maka terlebih dahulu masalah berkompetisi dengan masalah yang lain kemudian setelah itu akhirnya akan masuk kedalam agenda kebijakan

3. Pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah.

Langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah. Pada tahap ini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif kebijakan – kebijakan untuk memecahkan masalah tersebut.

4. Tahap Penetapan Kebijakan.

Tahap terakhir adalah penetapan kebijakan. Alternatif yang terbaik yang diambil diantara sekian banyak alternatif kebijakan yang dirumuskan maka ditetapkan diproses penetapan atau pengesahan ini. Proses ini merupakan proses yang sangat penting dalam proses implementasi kebijakan bahkan lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Karena hasil dari perumusan kebijakan akan dapat dilihat dengan ditetapkannya alternatif kebijakan yang telah dibuat sebagai jembatan yang menghubungkan formulasi dengan hasil kebijakan yang diharapkan. (Rusdiana, 2014)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengemukakan teori – teori terkait yang kemudian dihubungkan dengan temuan penelitian yang dilakukan dan kemudian disimpulkan. Penelitian ini dilakukan di SD – IT Tahfizil Qur'an Yayasan Islamic Center Sumatera Utara pada Agustus 2023. Sumber data yang diperoleh yaitu melalui partisipan yang sudah dilakukan kesepakatan untuk wawancara dan dokumentasi, diantaranya , kepala sekoah, wakil kepala sekolah serta staf dan pegawai. Data yang diperoleh merupakan data primer dan sekunder yang kemudian diolah untuk dijadikan bahan dalam penelitian ini. (Maharani, 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis kebijakan pendidikan dalam meningkatkan budaya mutu melalui proses tahapan yang telah ditentukan untuk merumuskan masalah yang nantinya memunculkan alternatif kebijakan sebagai penyelesaian masalah maupun meningkatkan mutu pendidikan. SD-IT Tahfizil Qur'an Yayasan Islamic Center Sumatera Utara (YIC –SU) merupakan sekolah dasar islam terpadu, yang menyepadukan program kurikulum pendidikan umum formal dengan program khusus tahfizil qur'an dengan sistematis yang tersusun dalam kurikulum. (Farkhan et al., 2022)

SD – IT Tahfizil Qur'an YIC - SU merupakan sekolah dasar yang sangat diminati oleh masyarakat dan orang tua, hal ini terlihat dengan terus meningkatnya jumlah pendaftar di SD – IT Tahfizil Qur'an YIC – SU dari tahun ke tahun. Maka ini merupakan suatu ukuran pencapaian mutu yang baik di SD – IT Tahfizil Qur'an YIC – SU dalam meningkatkan mutu dan kinerja lembaga ini.

Pencapaian ini didasari dengan adanya penerapan analisis kebijakan pendidikan yang dilakukan di organisasi SD – IT Tahfizil Qur'an YIC – SU untuk menerapkan alternatif alternatif kebijakan untuk mengatasi problematika dan meningkat mutu yang berkelanjutan. Dalam prosesnya ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh SD – IT Tahfizil Qur'an YIC – SU untuk melakukan analisis kebijakan pendidikan guna meningkat mutu pendidikan diantaranya : (Rusdiana, 2014)

1. Perumusan Masalah (*defining problem*)

Perumusan masalah dilakukan oleh mereka yang terkena masalah atau orang lain yang mempunyai tanggung jawab dan pembuat kebijakan yang mempunyai kapasitas atasnya. Perumusan masalah merupakan sumber dari kebijakan publik. Pemahaman terhadap masalah membantu memadukan pandangan yang bertentangan dengan rancangan peluang kebijakan baru, memetakan tujuan – tujuan yang memungkinkan, membantu menemukan asumsi – asumsi yang tersembunyi dan mendiagnosis penyebab – penyebabnya.

SD – IT Tahfizil Qur'an melakukan perumusan masalah dalam meningkatkan budaya mutu dengan cara melakukan penafsiran kebijakan – kebijakan pendidikan nasional yang nantinya di rumuskan menjadi kebijakan yang tepat, efektif dan efisien sejalan dengan visi – misi yang ada di sekolah tersebut. Kepala sekolah melakukan kegiatan pendidikan tetap mengikuti kebijakan nasional namun juga terus ber inovasi dalam mengembangkan kebijakan yang membangun budaya mutu yang berkelanjutan di SD – IT Tahfizil Qur'an YIC – SU

2. Agenda kebijakan dan pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah.

Agenda kebijakan timbul karena adanya pilihan dan kecondongan perhatian pemuat kebijakan. Pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah merupakan langkah selanjutnya yang digunakan untuk mengambil alternatif yang paling baik diantara alternatif-alternatif yang telah dirumuskan.

SD – IT Tahfizil Qur'an YIC – SU melakukan agenda kebijakan pendidikan ketika rapat internal. Yang mana kebijakan yang utuh di pegang oleh pihak yayasan yang kemudian di turunkan ke pihak SD – IT Tahfizil Qur'an YIC – SU untuk diterapkan. Pemilihan alternatif kebijakan juga dilakukan oleh kepala sekolah dengan melakukan musyawarah dengan pihak yayasan terlebih dahulu untuk memilih kebijakan yang tepat dan efektif serta efisien untuk membangun budaya mutu di SD – IT Tahfizil Qur'an YIC – SU.

3. Tahap Penetapan Kebijakan.

Tahap terakhir adalah penetapan kebijakan. Alternatif yang terbaik yang diambil diantara sekian banyak alternatif kebijakan yang dirumuskan maka ditetapkan diproses penetapan atau pengesahan ini. Proses ini merupakan proses yang sangat penting dalam proses implementasi kebijakan bahkan lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Karena hasil dari perumusan kebijakan akan dapat dilihat dengan ditetapkannya alternatif kebijakan yang telah dibuat sebagai jembatan yang menghubungkan formulasi dengan hasil kebijakan yang diharapkan.

Pada tahap ini SD – IT Tahfizil Qur'an YIC – SU.melakukan penetapan kebijakan yang telah dipilih kepada seluruh guru, staf dan pegawai serta murid dan wali murid, dengan secara komprehensif dan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada dengan tetap memperhatikan tujuan yang ingin dicapai yaitu budaya mutu yang baik dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

SD – IT Tahfizil Qur'an YIC - SU merupakan sekolah dasar yang sangat diminati oleh masyarakat dan orang tua, hal ini terlihat dengan terus meningkatnya jumlah pendaftar di SD – IT Tahfizil Qur'an YIC – SU dari tahun ke tahun. Maka ini merupakan suatu ukuran pencapaian mutu yang baik di SD – IT Tahfizil Qur'an YIC – SU dalam meningkatkan mutu dan kinerja lembaga ini.

Pencapaian ini didasari dengan adanya penerapan analisis kebijakan pendidikan yang dilakukan di organisasi SD – IT Tahfizil Qur'an YIC – SU untuk menerapkan alternatif alternatif kebijakan untuk mengatasi problematika dan meningkat mutu yang berkelanjutan.

Dalam prosesnya ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh SD – IT Tahfizil Qur'an YIC – SU untuk melakukan analisis kebijakan pendidikan guna meningkat mutu pendidikan diantaranya :

1. Perumusan Masalah (*defining problem*)

Perumusan masalah dilakukan oleh mereka yang terkena masalah atau orang lain yang mempunyai tanggung jawab dan pembuat kebijakan yang mempunyai kapasitas atasnya. Perumusan masalah merupakan sumber dari kebijakan publik. Pemahaman terhadap masalah membantu memadukan pandangan yang bertentangan dengan rancangan peluang kebijakan baru, memetakan tujuan – tujuan yang memungkinkan, membantu menemukan asumsi – asumsi yang tersembunyi dan mendiagnosis penyebab – penyebabnya.

SD – IT Tahfizil Qur'an melakukan perumusan masalah dalam meningkatkan budaya mutu dengan cara melakukan penafsiran kebijakan – kebijakan pendidikan nasional yang nantinya di rumuskan menjadi kebijakan yang tepat, efektif dan efisien sejalan dengan visi – misi yang ada disekolah tersebut. Kepala sekolah melakukan kegiatan pendidikan tetap mengikuti kebijakan nasional namun juga terus ber inovasi dalam mengembangkan kebijakan yang membangun budaya mutu yang berkelanjutan di SD – IT Tahfizil Qur'an YIC – SU

2. Agenda kebijakan dan pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah.

Agenda kebijakan timbul karena adanya pilihan dan kecondongan perhatian pemuat kebijakan. Pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah merupakan langkah selanjutnya yang digunakan untuk mengambil alternatif yang paling baik diantara alternatif-alternatif yang telah dirumuskan.

SD – IT Tahfizil Qur'an YIC – SU melakukan agenda kebijakan pendidikan ketika rapat internal. Yang mana kebijakan yang utuh di pegang oleh pihak yayasan yang kemudian di turunkan ke pihak SD – IT Tahfizil Qur'an YIC – SU untuk diterapkan. Pemilihan alternatif kebijakan juga dilakukan oleh kepala sekolah dengan melakukan musyawarah dengan pihak yayasan terlebih dahulu untuk memilih kebijakan yang tepat dan efektif serta efisien untuk membangun budaya mutu di SD – IT Tahfizil Qur'an YIC – SU.

3. Tahap Penetapan Kebijakan.

Tahap terakhir adalah penetapan kebijakan. Alternatif yang terbaik yang diambil diantara sekian banyak alternatif kebijakan yang dirumuskan maka ditetapkan diproses penetapan atau pengesahan ini. Proses ini merupakan proses yang sangat penting dalam proses implementasi kebijakan bahkan lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Karena hasil dari perumusan kebijakan akan dapat dilihat dengan ditetapkannya alternatif kebijakan yang telah

dibuat sebagai jembatan yang menghubungkan formulasi dengan hasil kebijakan yang diharapkan.

Pada tahap ini SD – IT Tahfizil Qur'an YIC – SU.melakukan penetapan kebijakan yang telah dipilih kepada seluruh guru, staf dan pegawai serta murid dan wali murid, dengan secara konfrehensif dan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada dengan tetap memperhatikan tujuan yang ingin dicapai yaitu budaya mutu yang baik dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairunisa, & Zulkarnain. (2018). Kebijakan Pendidikan di Indonesia Pada Masa Menteri Sarmidi Mangunsarkoro (1949-1950). *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(6), 606–616. <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/risalah/article/view/12755>
- Farkhan, A., Rahmah, A., Alwatasi, U., & Setiawan, F. (2022). Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(5), 1921. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i5.1354>
- Kemerdekaan, P., Reformasi, E., Perubahan, K., Muhaemin, S., Tarbiyah, J., Stain, A., & Email, P. (2017). Kebijakan Pengembangan Pendidikan: Pra Kemerdekaan-Era Reformasi dalam Konteks Perubahan Sosial. *Jurnal Studi Pendidikan*, XV(1), 1–14.
- Maharani, N. L. (2017). Kebijakan Sekolah Dalam Mengembangkan Budaya Mutu Pada Sekolah Regroupingdi Sd N Ungaran 1 Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 6, 275–288.
- Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan, J., & Abzul, O. (2022). *Student Journal of Educational Management Inovasi Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Budaya Mutu Sekolah*. 2, 80–96.
- Mubin Noho, Muh. Hizbul Muflihini, & Juliadarma, M. (2022). Reaktualisasi Budaya Mutu di Lembaga Pendidikan. *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 20(2), 166–175. <https://doi.org/10.53515/qodiri.2022.20.2.166-175>
- Muliati. (2016). No Title. *Revista CENIC. Ciencias Biológicas*, 152(3), 28. file:///Users/andreataquez/Downloads/guia-plan-de-mejora-institucional.pdf%0Ahttp://salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0Ahttp://www.revisitaalad.com/pdfs/Guias_ALAD_11_Nov_2013.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.15446/revf/acmed.v66n3.60060.%0Ahttp://www.cenetec.
- Ritaudin, A. (2021). Manajemen Budaya Mutu dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Sekolah Dasar. *Media Manajemen Pendidikan*, 3(3), 397. <https://doi.org/10.30738/mmp.v3i3.5071>
- Rusdiana, A. (2014). Kebijakan Pendidikan Nasional. *Kebijakan Pendidikan Dari Filosofi Ke Implementasi*, 21–316.
- Sartika, A., Manajemen, P., Islam, P., Ilmu, F., Dan, T., Negeri, U. I., & Utara, S. (2020).